

## PROSEDUR STANDAR UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

Nomor Dokumen: PR-DU-GCS: 004

	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Disiapkan oleh	Corporate Communication Department Head	Nabila	22 JULI 2025
Diperiksa oleh	PGS Corporate Secretary Division Head	Yully Purwanti	22.07.2025
Diverifikasi oleh	Governance & Risk Group Head	Albnu Wahyudi	
Disetujui oleh	Direktur Utama	Raisha Syarfuan	

No. Salinan:

Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari PT Sarinah



# PT SARINAH PROSEDUR STANDAR Doc. No. Revisi PR-DU-GCS:004 SI INFORMASI YANG Tanggal Efektif

### UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Halaman

1 dari 4

### I. TUJUAN:

Prosedur ini menjelaskan mekanisme pengujian terhadap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan dari akses publik karena dapat membahayakan kepentingan tertentu.

### II. RUANG LINGKUP:

Dimulai dari permintaan unit kerja terkait informasi yang layak dikecualikan, pengisian template, proses kajian oleh Tim Pertimbangan, sampai dengan penerbitan keputusan hasil uji konsekuensi.

### III. REFERENSI

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor 057/KPTS/DIREKSI/XII/2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Informasi PT Sarinah (Persero)
- 5. Keputusan Direksi PT Sarinah Nomor 0082/DIREKSI/KPTS/XI/2024 tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT Sarinah
- Peraturan Direksi PT Sarinah Nomor: 0010/DIREKSI/PD/XI/2024 tanggal 20 Nopember 2024 tentang Penyusunan Pedoman, Prosedur dan Instruksi Kerja PT Sarinah

### IV. DEFINISI:

Daftar Informasi Publik (DIP) : Dokumen yang memuat jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan, disediakan setiap saat, serta informasi serta

merta.

**PPID** 

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab atas layanan dan pengelolaan

informasi publik di PT Sarinah.

Atasan PPID

: Pejabat yang secara struktural membawahi PPID dan bertugas memberikan persetujuan terhadap dokumen kebijakan informasi publik.

Petugas Pelayanan Informasi : Pelaksana teknis harian layanan informasi pada

Informasi Tim Pertimbangan perusahaan

חומס

: Pejabat di perusahaan yang memiliki tugas, fungsi, dan kompetensi di bidang hukum dan tata kelola perusahaan.

Informasi Berkala

: Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, selambatlambatnya satu kali dalam setahun yang meliputi informasi

lambatnya satu kali dalam setahun yang meliputi informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Perusahaan, Informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau Informasi lain yang diatur

dalam perundang-undangan.



### PT SARINAH PR-DU-GCS:004 Doc. No. PROSEDUR STANDAR Revisi Tanggal Efektif 2 dari 4 Halaman

### UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi Serta Merta

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Informasi Tersedia Setiap Saat

Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah pengawasan Perusahaan, tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.

Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik atau Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi

Uji Konsekuensi

: Proses analisis dan pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan status pengecualian informasi.

Savinak An injourney retail

Dokumentasi (PPID) PT Sarinah	Informasi dan	Pejabat Pengelola		
	Disahkan Oleh	Tanggal Efektif Dilakukan	Tanggal Pembuatan	No. Standar Operasional
	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Sarinah	2025	2025	PR-DU-GCS-004

- Nama/Judul SOP

# Alur Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan

r		<del>,</del>			F	
2	H	1	NO.			Dasar 1. Un 2. Per
Melakukan asistensi pengisian template usulan Informasi yang Dikecualikan	Mengirimkan permintaan daftar informasi yang tidak layak dibuka kepada publik beserta pertimbangannya kepada seluruh unit kerja perusahaan	2	KEGIATAN			Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
		3	PETUGAS LAYANAN INFORMASI PT SARINAH	P	AL	ntang Keterbukaan Info Tahun 2021 Tentang S
		4	PPID PT SARINAH	PELAKSANA	UR UJI KONSE	rmasi Publik tandar Layanan
		5	ATASAN PPID PT SARINAH		ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKE	Informasi Publik
Dokumen regulasi: 1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1. Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan internal terkait	1. Internal memo permintaan Informasi beserta pertimbangannya 2. Formulir/template pengisian	7	KELENGKAPAN	M	IASI DIKECUALIKAN	Kualifikasi Pelaksana:  1. PPID PT Sarinah memahami:  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Standar Layanan  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan  6. Surat Keputusan Pengangkatan PPID dan Tugas Pokok serta Fungsi PPID  7. Petugas Layanan Informasi PT Sarinah memiliki kemampuan:  8. Memahami inventarisasi, penyediaan, pendokumentasian, dan pengelolaan informasi  8. Memahami penggunaan teknologi informasi
5 hari	1 hari	8	WAKTU (Hari Kerja)	MUTU BAKU		memahami: mor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Ir formasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Stand ngangkatan PPID dan Tugas Pokok serta Fur Informasi PT Sarinah memiliki kemamp isasi, penyediaan, pendokumentasian, dan paan teknologi informasi
Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	9	OUTPUT			ng Standar Layanan serta Fungsi PPID <b>(emampuan:</b> an, dan pengelolaan informasi

10	9	Co.	7	0	ы	4	s
Memberikan persetujuan atas ) penetapan Informasi yang Dikecualikan	Memeriksa dan memberikan paraf pada dokumen di angka 8	Menyusun konsep Surat Penetapan atau Keputusan Direksi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta lampiran berupa hasil Uji Konsekuensi	Memastikan kelengkapan berkas, mendokumentasikan dan mencatat poin-poin yang dihasilkan selama proses Uji Konsekuensi.	Memimpin proses Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan bersama PPID PT Sarinah	Menyusun dan mengirim undangan kepada Tim Pertimbangan untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan	Memeriksa hasil kelengkapan dokumen pada angka 3 dan melakukan kajian atas Informasi atau dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	Memeriksa kelengkapan hasil pengisian dan pertimbangan informasi dari seluruh unit kerja perusahaan serta kesesualannya dengan ketentuan perundang-undangan lalu melaporkannya kepada PPID PT Sarinah
	5						1
0-1-							
Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan beserta lampirannya	Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan beserta lampirannya	Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan beserta lampirannya	1. Dokumen-dokumen regulasi 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya:	1. Dokumen-dokumen regulasi 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	Internal memo	1. Dokumen-dokumen regulasi 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	1. Tabel klasifikasi informasi yang dikecualikan 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan internal terkait
2 hari	2 hari	1 hari	2 hari	1 hari	1 hari	3 hari	2 hari
Penetapan Informasi yang Dikecualikan	Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang sudah diparaf	Konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang sudah diparaf	Notulen rapat Uji Konsekuensi	Pertimbangan tertulis	Undangan rapat Uji Konsekuensi	Notulen kajian informasi	Usulan Daftar Informasi yang Dikecual熊an beserta pertimbangannya